



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
PERTEMUAN/AUDENSI  
KARYAWAN PT. DIRECT VISION  
DENGAN ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	:	2009 – 2010
Masa Sidang	:	II
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Audensi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	<b>Rabu, 3 Februari 2010</b>
Pukul	:	10.30 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Tamu Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I, Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta.
Hadir Anggota	:	1. Zuber Safawi, S.H. 2. Rieke Dyah Pitaloka
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiarti Ningrum (Kabag Set Komisi IX DPR RI)
Acara/Topik	:	Membahas permasalahan PHK sepihak
Dengan		Karyawan PT. Direct Vision (Astro)
Hadir Pemerintah	:	-----
Hadir Delegasi Masy.	:	13 orang

**I. PENDAHULUAN**

Per pertemuan dengan delegasi karyawan PT. Direct Vision dimulai pukul 10.30 WIB.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Delegasi Karyawan PT Direct Vision menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai belum diterimanya hak-hak karyawan berupa gaji, tunjangan, jamsostek, asuransi dll selama 5 bulan. Karyawan PT. Direct Vision merupakan karyawan ex operator TV prabayar Astro yang telah berhenti siaran.

2. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010, Direktur PT Direct Vision menyampaikan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informasi, KPI dan SKDI, dimana mereka mengundang Tim Verifikasi. Diduga ada perpanjangan ijin PT Direct Vision tanpa diketahui oleh karyawan PT Direct Vision.
3. Semula jumlah Karyawan 380 orang, saat ini berjumlah 203 orang yang terbagi di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Aceh, Palembang, Pekanbaru, Lampung, Padang dan Batam. Jumlah karyawan yang berada di head office berjumlah 130 orang, karyawan sangat menanti masalah upah.
4. Bahwa PT Direct Vision mulai berhenti siaran pada tanggal 20 Oktober 2008- Agustus 2009. Pembiayaan operasional PT Direct Vision bersumber dari iuran pelanggan yang berada pada uang kas PT Direct Vison.
5. Berdasarkan pernyataan karyawan bahwa, dana Jamsostek tidak dibayarkan lagi ke pihak Jamsosotek mulai Juni 2009.
6. Pada tanggal 16 September 2009, perwakilan karyawan PT Direct Vision diminta untuk membuat surat pernyataan, surat tersebut dikirimkan kepada salah satu direksi PT. Direct Vision. Pada September 2009 karyawan menerima THR dalam bentuk tunai pada H-1 (sebelum lebaran) yang dilakukan pembayarannya bukan oleh PT Direc Vision tapi dari dana talangan PT Muara Mitra Bahagia. Bahwa sejak Oktober 2009, karyawan tidak menerima bukti rincian gaji (slip gaji).
7. Pada tanggal 7 Oktober 2009 karyawan PT. Direct Vision yang berlokasi di Jakarta menerima gaji (cash keras) untuk periode September, padahal pembayaran normal seharusnya setiap tanggal 25. Sementara rekan-rekan karyawan yang berlokasi di luar Jakarta dilakukan pada minggu ketiga di bulan Oktober 2009.
8. Bahwa karyawan belum menerima hak-haknya berupa upah/gaji dan tunjangan lainnya selama 4 bulan sampai saat ini yaitu untuk gaji bulan Oktober 2009 – Januari 2010, namun karyawan masih masuk kantor seperti biasa. Karyawan mengharapakan adanya kepastian kelangsungan operasional PT Direct Vision.
9. Untuk karyawan yang berada di head office secara sukarela mengumpulkan uang untuk membantu lainnya. Saat ini kehidupan karyawan sudah memprihatinkan karena tuntutan kebutuhan hidup yang tinggi.
10. Secara prosedural karyawan sudah menyampaikan permasalahannya kepada direktur sebanyak tiga kali, yang tembusannya disampaikan kepada Disnaker dan Sudin, namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan. Bahkan karyawan juga menyampaikan permasalahan kepada Menakertrans tertanggal 29 Desember 2009 dan memperoleh tanggapan dari Kemenakertrans tertanggal 28 Januari 2010 yang intinya

menyarankan agar permasalahan disampaikan kepada kepala Sudin Nakertrans setempat.

### **III. CATATAN PENTING**

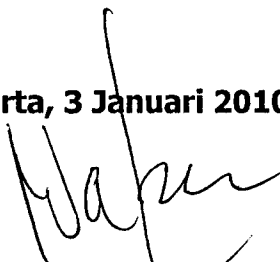
Pertemuan Pokja Nakertrans dengan Karyawan PT Direct Vision pada hari ini menghasilkan catatan penting sebagai berikut :

1. Anggota DPR RI pada prinsipnya mendukung/menerima aspirasi yang disampaikan karyawan PT Direct Vision untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dialami para karyawan mengingat permasalahan tersebut sudah lama.
2. Selanjutnya Anggota DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tentang belum diterimanya hak-hak karyawan berupa gaji, tunjangan, jamsostek, asuransi dll selama 5 bulan tersebut kepada Dirjen PHI Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirjen PHI berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **IV. PENUTUP**

Pertemuan ditutup pukul 12.00 WIB.

**Jakarta, 3 Januari 2010**



**ZUBER SAFAWI, S.H.**